



STATISTIK PENGAWASAN

2021

*INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA
JL. kenari 51 yogyakarta*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya maka laporan Statistik Hasil Pengawasan Tahun 2021 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan Statistik Pengawasan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan laporan yang menyajikan informasi yang berkaitan dengan pengawasan antara lain jumlah temuan, rekomendasi, tindak lanjut meliputi per aspek kode, per rincian, informasi pengawasan lainnya disamping juga menampilkan profil Inspektorat.

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada berbagai pihak atas terwujudnya penyusunan laporan Statistik Pengawasan Tahun 2021. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan Statistik ini masih terdapat banyak kekurangan, maka kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan.

Semoga laporan Statistik Pengawasan Tahun 2021 ini dapat memenuhi kebutuhan bagi pengguna data dan dapat memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan terutama pada sisi perencanaan pada tahun berikutnya

Yogyakarta,

Inspektur Kota Yogyakarta



FITRI PAULINA ANDRIANI, ST *PA*
NIP. 19700327 199503 2 002

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, Inspektorat kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Dalam rangka melaksanakan fungsi penilaian tugas pengawasan disusunlah statistik hasil pengawasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta selama 5 tahun dari 2017 sampai 2021.

I.2 Profil Inspektorat

Inspektorat Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta. Inspektorat Kota Yogyakarta adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tahun 2019 BPKP melakukan Penilaian Tata Kelola APIP dan nilai yang didapat pada level 1 sampai dengan level 6 berdasarkan hasil penjaminan kualitas (quality assurance) atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Yogyakarta nomor SP-2569/D3/04/2019 Tanggal 27 Desember 2019 dengan nilai kapabilitas APIP pada level 3.

Pada tahun 2021 berdasarkan base line Maturitas SPIP Terintergrasi LHE Nomor S-3310/PW12/3/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan hasil Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP berada pada Level "**terdefinisi**" (level 3). Hasil Pengukuran terhadap 3 indikator penilaian menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar "**3,20**".

I.2.1 Susunan Organisasi Inspektorat

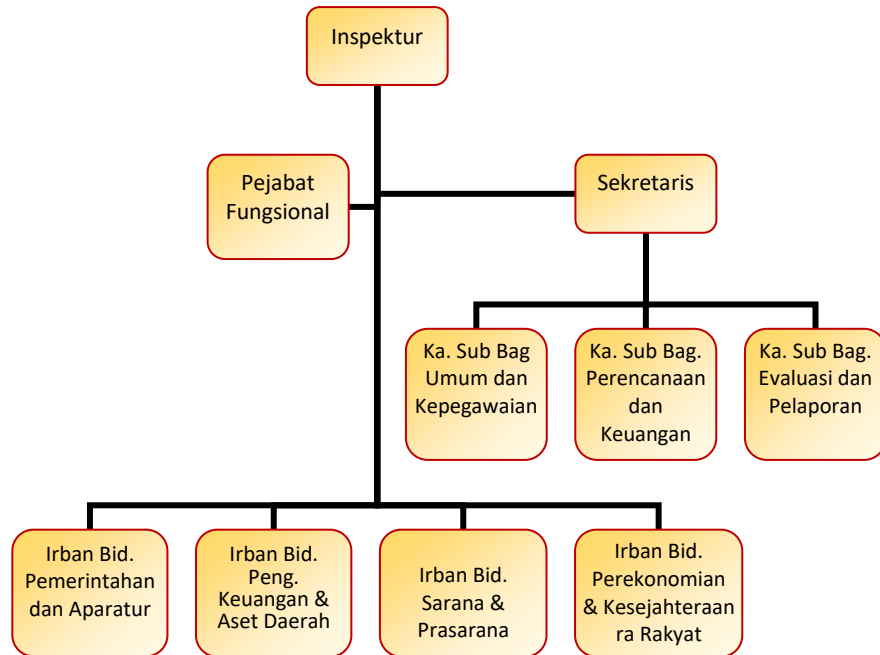
Susunan organisasi Inspektorat menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

-
- 1) Analis Tata Usaha
 - 2) Pengadministrasi Umum
 - 3) Pengadministrasi Kepegawaian
 - 4) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
 - 5) Petugas Keamanan
 - 6) Pramuk Bakti
 - 7) Pengemudi
 - 8) Pramuk Kebersihan
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 1) Bendahara
 - 2) Verifikator keuangan
 - 3) Pengolah Data Laporan Kas
 - 4) Pengelola Gaji
 - 5) Pengadministrasi Keuangan
 - 6) Analis Rencana Program dan Kegiatan
 - 7) Pengelola Akuntansi
 - c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - 1) Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan
 - 3) Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan
3. Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
 4. Irban Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
 5. Irban Bidang Pembangunan Fisik
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan
 6. Irban Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya
 - 1) Analis Bidang Pengawasan
 - 2) Pengelola Pengawasan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gbr I.2.1.1 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat



I.2.2 Sumber Daya Manusia

Jumlah personil Inspektorat sebanyak 62 (enam puluh dua) orang PNS dan 3 (tiga) orang Tenaga Teknis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2021

No	Jabatan	Formasi	Bezeting	%
1	Struktural	9	8	88.88
2	Auditor	56	39	68.42
3	P2UPD	5	1	20
4	Fungsional Umum	33	12	36.36
5	Auditor Kepegawaian	2	2	50.00
6	Pranata Komputer	1	0	0
	Jumlah	107	62	57.40

Tabel I.2.2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	24
2.	Perempuan	38
	Jumlah	62

Tabel I.2.2.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan per 31 Desember 2021

No.	Pangkat	Gol	Jumlah	%
1.	Pembina Utama Muda	(IV/c)	2	3.32
2.	Pembina Tingkat 1	(IV/b)	4	6.45
3.	Pembina	(IV/a)	6	9.67
4.	Penata Tingkat I	(III/d)	11	17.74
5.	Penata	(III/c)	7	11.29
6.	Penata Muda Tingkat I	(III/b)	6	9.67
7.	Penata Muda	(III/a)	10	16.12
8.	Pengatur Tingkat I	(II/d)	2	3.32
9.	Pengatur	(II/c)	13	20.96
10.	Pengatur Muda Tingkat I	(II/b)	1	1.61
11.	Pengatur Muda	(II/a)	0	0
		Jumlah	62	100.00

Tabel I.2.2.4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2021

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	0	0
2	SMP	1	1.61
3	SMA/SMK	6	9,67
4	D3	14	22.58
5	D4/S1	34	54.83
6	S2	7	11.29
	Jumlah	62	100

Dalam melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, Inspektorat Kota Yogyakarta telah melaksanakan kerjasama dengan penyedia jasa, yaitu :

1. Pemelihara Kebersihan : 2 orang
2. Penjaga Keamanan : 4 orang

Tabel I.2.2.5 Rekapitulasi Jumlah Auditor Berdasarkan Penjenjangan Sertifikasi per 31 Desember 2021

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Calon Auditor	2	5.12
1	Pelaksana	9	23.07
2	Pelaksana Lanjutan	1	2.56
3	Penyelia	0	0
4	Pertama	9	23.07
5	Muda	10	25.64
6	Madya	8	20.51
	Jumlah	39	100

*Prosentasi perlu disesuaikan dengan data yang ada

Secara rutin Inspektorat mengadakan pelatihan maupun bimtek dalam upaya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia, pada Tahun 2021 sudah dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel I.2.2.6 Jenis, Jumlah peserta dan waktu pelaksanaan Peningkatan SDM APIP per 31 Desember 2021

No.	Nama Diklat	Tanggal	Tempat	Nama Peserta Diklat	Nomer Sertifikat Diklat	
1	Teknik Audit Berbantuan Komputer	15 - 19 Februari 2021	Pusdiklatwas Ciawi	1	LIZTA PERMATA NURWATI, S.IP.	SERT-0583/DL/3/2021, 19-02-2021
2				ROHANA DIAN PUSPASARI, S.Sos	SERT-0590/DL/3/2021, 19-02-2021	
3				DUWINDA FERRY SAPUTRA, S.T.	SERT-0575/DL/3/2021, 19-02-2021	
4				LINA NUR AENI, S.Farm	SERT-0582/DL/3/2021, 19-02-2021	
2	Peran Konsultatif Bagi Auditor Internal	22 - 26 Februari 2021	Pusdiklatwas Ciawi	1	NOVITA, SE,MPA	SERT-0396/DL/4/2021, 26-02-2021
2				SYAHNIDAR ZUHRA NAZILA, S.Farm	SERT-0399/DL/4/2021, 26-02-2021	
3	Pembentukan Auditor Pertama	e-learning: 22 Feb - 8 Mart 2021 Tatap Muka: 15 - 31 Mart 2021	Pusdiklatwas Ciawi		ANKI CAHYA KESUMADEWI, S.Tr.Keb.	SERT-1492/DL/3/2021, 31-03-2021
4	Pembentukan Auditor Terampil	e-learning: 8-19 April 2021	Pusdiklatwas Ciawi	1	AJENG MAYA STEFANNY SETIAWATY, A.Md.	SERT-3381/DL/3/2021, 15-06-2021

No.	Nama Diklat	Tanggal	Tempat	Nama Peserta Diklat		Nomer Sertifikat Diklat
		Tatap Muka: 2-15 Juni 2021 2021		2	RIA RIZKY FADHILLAH, A.Md	SERT-3403/DL/3/2021, 15-06-2021
				3	ANGGI RIZKY DAMAYANTI SATRIA, A.Md.	SERT-3383/DL/3/2021, 15-06-2021
				4	DIASMITA NOVEMILIA SARI, A.Md.	SERT-3387/DL/3/2021, 15-06-2021
				5	NISA ISNAINI, A.Md.	SERT-3401/DL/3/2021, 15-06-2021
				6	RISKI CHOIRUL RAHMAWATI, A.Md	SERT-3405/DL/3/2021, 15-06-2021
				7	RIFQI KHOIRUNNISA, A.Md	SERT-3404/DL/3/2021, 15-06-2021
				8	RIZKY ALBAB GHIFFARI, A.Md.	SERT-3406/DL/3/2021, 15-06-2021
5	Pembentukan Auditor Pertama	e-learning: 4 - 16 Juni 2021 Tatap Muka: 23 Juni - 8 Juli 2021	Pusdiklatwas Ciawi		TRI WAHYUNI SEKARINGSIH, S.T.	SERT-4180/DL/3/2021, 09-07-2021
6	Teknik Audit Berbantuan Komputer	7 - 11 Juni 2021	Pusdiklatwas Ciawi	1	ABNER BERNARD ARMADANI, S.Kom	SERT-3345/DL/3/2021, 11-06-2021
				2	FARID RAHMANTO,SH	SERT-3359/DL/3/2021, 11-06-2021
				3	SIWI CATUR NUGRAHA, S.E.	SERT-3373/DL/3/2021, 11-06-2021
				4	TEDDY WIDYANTO, S.T.	SERT-3376/DL/3/2021, 11-06-2021
7	Penilaian Maturitas SPIP	14 - 18 Juni 2021	Pusdiklatwas Ciawi	3	MARISA NURMASARI, S.H.	SERT-3021/DL/4/2021, 18-06-2021
8	Pelatihan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	28 Juni - 2 Juli 2021	BPKP Perwakilan DIY	1	ESTI RAHAYU APRIYANTI, SE	SERT-3572/DL/4/2021, 02-07-2021
				2	YOHANNA PURNOMO SARI, ST, M.Eng.	SERT-3593/DL/4/2021, 02-07-2021

No.	Nama Diklat	Tanggal	Tempat	Nama Peserta Diklat		Nomer Sertifikat Diklat
9	Teknik Audit Berbantuan Komputer	12 - 16 Juli 2021	Pusdiklatwas Ciawi		AGUS WIDODO, ST	SERT-4748/DL/3/2021, 16-07-2021
10	Penulisan Laporan Hasil Audit Intern	23 - 27 Agustus 2021	Pusdiklatwas Ciawi		DHANI DWI ASTUTI, SE, MA	SERT-5296/DL/3/2021, 27-08-2021
11	Penilaian Maturitas SPIP	27 September - 1 Oktober 2021	Pusdiklatwas Ciawi	1	NURHADIYANTA, S.E.	SERT-7046/DL/4/2021, 01-10-2021
				2	IKA ANGGITASARI, S.IP.	SERT-7035/DL/4/2021, 01-10-2021
				3	RIO DICKY ANDREANTO, S.H.	SERT-7047/DL/4/2021, 01-10-2021
12	Audit Pendapatan Asli Daerah	27 September - 1 Oktober 2021	Pusdiklatwas Ciawi	1	MEI NURNINGSIH, S.E.	SERT-6258/DL/3/2021, 01-10-2021
				2	ERNA SUSILA, S.E.	SERT-6214/DL/3/2021, 01-10-2021
13	Manajemen Pengawasan	12 - 15 Oktober 2021	Pusdiklatwas Ciawi		HASTANTI, S.E.	SERT-7333/DL/4/2021, 15-10-2021
14	Audit Kinerja Pemerintah Daerah	25 - 29 Oktober 2021	Pusdiklatwas Ciawi	1	YOHANNA PURNOMO SARI, ST, M.Eng.	SERT-7563/DL/4/2021, 29-10-2021
				2	ESTI RAHAYU APRIYANTI, SE	SERT-7545/DL/4/2021, 29-10-2021
16	Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Angkatan III	1-5 November 2021	DKI Jakarta	1	SRI MULYATI, S.Ap., MM	
17	Penilaian Maturitas SPIP	15 - 19 November 2021	Pusdiklatwas Ciawi	1	LATHIF ARIS PUTRA, S.IP.	SERT-8291/DL/4/2021, 19-11-2021
				2	ANDI SISTIOKO MARGONO, A.Md.	SERT-8279/DL/4/2021, 19-11-2021
				3	SUPARNO, A.Md.	SERT-8298/DL/4/2021, 19-11-2021
18	Pengawasan intern Berbasis Risiko	15 - 19 November 2021	Yogyakarta	1	FARID RAHMANTO,SH	SERT-8586/DL/4/2021, 19-11-2021

No.	Nama Diklat	Tanggal	Tempat	Nama Peserta Diklat	Nomer Sertifikat Diklat
				2 TRI WAHYUNI SEKARINGSIH, S.T.	SERT-8603/DL/4/2021, 19-11-2021
				3 ANKI CAHYA KESUMADEWI, S.Tr.Keb.	SERT-8577/DL/4/2021, 19-11-2021
				4 DIASMITA NOVEMILIA SARI, A.Md.	SERT-8581/DL/4/2021, 19-11-2021
19	Pembentukan Auditor Muda	2 November - 1 Desember 2021	Pusdiklatwas Ciawi	VINCENTIUS AGUS RIBIYANTO, S.T.	SERT-8797/DL/3/2021, 01-12-2021

I.2.3 Sarana dan Prasarana

Inspektorat Kota Yogyakarta menempati gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang berlokasi di Jalan Kenari No. 51 Yogyakarta dengan luas tanah 730 m² terdiri bangunan 1.176 m².

Sarana dan prasarana penunjang pengawasan yaitu:

Tabel I.2.3.1 Profil Sarana Prasarana per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 2	13 unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	6 unit	Baik
3.	Handycam	2 buah	Baik
4.	LCD Proyektor	3 buah	Baik
5.	Camera Digital	4 buah	Baik
6.	Rollmeter	3 buah	Baik
7.	Scanner	3 unit	Baik
8.	Komputer	26 unit	Baik
9.	Printer	23 unit	Baik
10.	Lap Top	24 unit	Baik
11.	Pengukur ketebalan besi	1 buah	Baik
12.	Checker perhitungan	2 buah	Baik
13.	Pengukur test beton	2 buah	Baik
14.	Telephone PABX LG	2 buah	Baik
15.	Meteran Laser	4 buah	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi
16.	Telephone SLJJ Word phone	1 buah	Baik
17.	Mesin penghancur kertas	2 buah	Baik
18.	Tablet	1 buah	Baik
19.	Voice recorder	1 buah	Baik
20.	Whiteboard 2 muka	1 buah	Baik
21.	Wireles	2 buah	Baik
22.	Air Purifyer	2 buah	Baik
23.	Meja kubikal	24 unit	Baik
24.	Kursi kerja	54 buah	Baik
25.	Sepeda	1 unit	Baik
26.	Scanner portable	4 buah	Baik
27.	Genset	1 buah	Baik
28.	Tensi Meter	1 buah	Baik
29.	Televisi	8 buah	Baik
30.	Kursi Tamu/Sofa	3 unit	Baik
31.	Mobile File	1 unit	Baik

I.2.4 Perencanaan

Tahun 2021 merupakan tahun kelima dari perencanaan jangka menengah tahun 2017 – 2022.

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Inspektorat Kota Yogyakarta memuat Visi dan Misi RPJMD, Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan.

a. Visi

Visi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan”

b. Misi

Dengan perumusan Misi yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak maka segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dapat diarahkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan karena Misi berperan sebagai pemandu dalam tindakan manajemen yang diperlukan.

Misi Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu :

- a. Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Kota
- b. Misi 2 : Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakatan

- c. Misi 3 : Memperkuat moral,etika dan budaya masyarakat kota Yogyakarta.
- d. Misi 4 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- f. Misi 6 : Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
- g. Misi 7 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat mendukung pencapaian Misi ke-7.

c. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Inspektorat dirumuskan :
Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan uraian indikator Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern 3,4

d. Sasaran :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil.

Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2017 yang ditetapkan Inspektorat Kota Yogyakarta adalah Kepatuhan auditan (*stakeholder*) terhadap hasil pengawasan meningkat dengan uraian sasaran indikator Prosentase (%) rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan 91%.

Tabel 1.2.4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi RPJMD	Misi ke-7	Tujuan	Sasaran
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya saing kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan berpijak pada Nilai Keistimewaan.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Kepatuhan auditan (<i>stakeholder</i>) terhadap hasil pengawasan meningkat.

e. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diimplementasikan menjadi 3 program dan 10 kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

-
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
- 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
- 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 2 Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pengawasan Inspektorat dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berisi Obyek Pemeriksaan, hari Pemeriksaan, Jenis Pemeriksaan, Jadwal/Tata kala, Tim Pemeriksaan, dan rencana anggaran.

I.2.5 Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta melaksanakan mandat yang diberikan oleh Walikota diperlukan adanya dana pendukung. Selama ini dana untuk mendukung operasional kegiatan ditunjang dari satu sumber dana yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Tabel I.2.5.1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 - 2021

No	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2017	7.018.820.671	6.616.836.735,74	92,74
2	2018	5.103.110.829	4.771.863.982,66	93,51
3	2019	5.837.657.205	5.547.309.484,78	95,03
4	2020	4.971.074.436	4.732.018.772	95,19
5	2021	10.352.892.475	9.641.888.854,81	93,13

Tabel I.2.5.2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2017 - 2021 (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	Belanja Tidak Langsung	3.302.447.203	3.180.474.681	96,31
	Belanja Langsung	3.716.373.468	3.436.352.054,74	92,74
2018	Belanja Tidak Langsung	3.231.105.119	3.080.088.799	95,33

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Langsung	1.872.005.710	1.691.775.183,66	90,37
2019	Belanja Tidak Langsung	3.726.299.708	3.589.659.462	96,33
	Belanja Langsung	2.111.357.497	1.957.650.022,78	92,72
2020	Belanja Tidak Langsung	4.172.025.000	3.949.900.292	94,68
	Belanja Langsung	799.049.436	782.118.479,74	97,88
2021	Belanja Operasi	10.185.122.785	9.484.859.599,81	93,12
	Belanja Modal	167.769.690	157.029.255	93,59

Tabel I.2.5.3 Perbandingan Anggaran Inspektorat dengan APBD Tahun 2017 – 2021

No.	Tahun Anggaran	Anggaran Inspektorat (Rp)	APBD (Rp)	Prosentase (%)
1	2017	7.018.820.671	1.666.195.785.675	0,42
2	2018	5.103.110.829	1.795.669.529.194	0,28
3	2019	5.547.309.485,78	1.943.940.157.146,52	0,29
4	2020	4.172.025.000	1.739.029.726.943	0,24
5	2021	10.352.892.475	1.813.808.287.704	0,57

BAB II HASIL PENGAWASAN

II.1 Audit Operasional

adalah audit yang dilaksanakan secara komprehensif dengan ruang lingkup meliputi 4 (empat) aspek yaitu :

1. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi dan Kinerja
2. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Aspek Pengelolaan Keuangan
4. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Audit dilakukan dengan tujuan:

1. Menilai kecukupan pengendalian manajemen guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien;
2. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur efektifitas pelaksanaan program pembangunan;
3. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termasuk kebijakan, prosedur dan arahan pimpinan instansi pemerintah yang diperiksa.

Obyek audit operasional adalah SKPD beserta unit kerja teknis di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta.

Tabel II.1.1 Jumlah Obyek Audit Operasional/Kinerja Tahun 2017 – 2021

Tahun	Jumlah
2017	40
2018	40
2019	27
2020	10
2021	9

Temuan audit diidentifikasi kedalam beberapa kategori diantaranya yaitu berdasarkan kode temuan, aspek pemeriksaan, temuan bersifat finansial/dapat dinilai uang, kelompok penyebab, dan sifat rekomendasinya.

Tabel II.1.2 Kelompok Temuan Audit Operasional
Tahun 2017 – 2021

No	Temuan			Jumlah				
	Kelompok	Sub Kel.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan		34	14	14	3	2
2		01	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	21	10	7	2	2
3		02	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	-	1	1	-	-
4		03	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	4	-	-	-	-
5		04	Administrasi	9	3	6	1	-
6		05	Indikasi tindak pidana	-	-	-	-	-
7	2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		9	3	3	1	0
8		01	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	1	1	1	-	-
9		02	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	4	2	-	-	-
10		03	Kelemahan struktur pengendalian intern	4	-	2	1	-
11	3	Temuan 3E		2	2	1	0	0
12		01	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	-	-	-	-	-
13		02	Ketidakefisienan	-	-	-	-	-
14		03	Ketidakefektifan	2	2	1	-	-
		Total		45	19	18	4	2

Tabel II.1.3 Aspek Temuan Audit Operasional Tahun 2017 - 2021

No	Aspek Pemeriksaan	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
1	Aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi	1	2,22%	5	26,32%	14	77,77 %	0	0 %	0	0%
2	Aspek pengelolaan keuangan	30	66,67%	2	10,53%	3	16,66 %	2	22,22 %	2	100%

No	Aspek Pemeriksaan	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2021	
3	Aspek pengelolaan sumber daya manusia	10	22,22%	12	63,16%	1	5,55 %	7	77,78%	0	0%
4	Aspek pengelolaan sarana dan prasarana	4	8,89%	1	5,26%	0	0	0	0 %	0	0%
Total		45		19		18		9		2	

Tabel II.1.4 Temuan Audit Operasional Bersifat Finansial/dapat Dinilai Uang Tahun 2017 -2021 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kerugian negara/ daerah	105.987.507,41	29.652.772,00	34.386.900,63	3.180.834	16.510.560,82
2	Kewajiban setor kepada negara/daerah	-	-	-	-	-
Total		105.987.507,41	29.652.772,00	34.386.900,63	3.180.834	16.510.560,82

*) Pemeriksaan Reguler

Tabel II.1.5 Kelompok Rekomendasi Temuan Audit Operasional Tahun 2017 - 2021

No	Kode	Deskripsi	Jumlah				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	01	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D dan masyarakat	26	10	6	1	2
2	02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat	0	1	0	0	0
3	03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	0	0	0	0	0
4	04	Penghapusan barang milik negara/daerah	0	0	0	0	0
5	05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	30	7	15	3	0
6	06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	15	3	10	6	0
7	07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	14	3	1	0	0
8	08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	1	2	1	0	0
9	09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan	14	8	5	4	0
10	10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	1	0	0	0	0
11	11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus	0	0	0	0	0

No	Kode	Deskripsi	Jumlah				
			2017	2018	2019	2020	2021
		kepada instansi yang berwenang					
12	12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0	2	0	0
13	13	Pelaksanaan sosialisasi	0	0	0	0	0
14	14	Lain-lain	0	0	1	2	0
Total			90	34	41	16	2

*) Pemeriksaan Reguler

II.2 Audit Dengan Tujuan Tertentu

Audit dengan Tujuan Tertentu adalah Audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar Audit Keuangan, Audit Operasional dan Audit Kinerja, antara lain Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah, Pengawasan Pengendalian Kepegawaian, Audit Bersifat Khusus/Investigatif/ Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (Auditi) atau yang bersifat khas. Pemeriksaan khusus berkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

a. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Tematik

Tabel II.2.a.1 Jumlah Audit Dengan Tujuan Tertentu Tematik Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah Audit
2017	22
2018	22
2019	18
2020	11
2021	31

Tabel II.2.a.2) Kelompok Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu (Tematik) Tahun 2017 - 2021

No	Temuan			Jumlah				
	Kelompok	Sub Kel.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan						
2		01	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1	4	2	0	0
3		02	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	1	-	1	0	1

No	Temuan			Jumlah					
	Kelompok	Sub Kel.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	
4		03	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	1	10	3	0	0	
5		04	Administrasi	1	1	2	0	0	
6		05	Indikasi tindak pidana	-	-	0	0	0	
7	2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern							
8		01	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	-	6	0	0	0	
9		02	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	-	2	3	0	0	
10		03	Kelemahan struktur pengendalian intern	-	-	1	0	0	
11	3	Temuan 3E							
12		01	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	-	-	0	0	0	
13		02	Ketidakefisienan	-	-	0	0	0	
14		03	Ketidakefektifan	-	-	0	5	0	
		Total		4	23	12	5	1	

Tabel II.2.a.3) Aspek Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu

No	Aspek Audit	Tahun 2017		Tahun 2018		2019		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Aspek pengelolaan tugas pokok dan fungsi	5	22,73	-	-	5	42	2	50%	-	-
2	Aspek pengelolaan keuangan	13	59,09	5	21,74	6	50	2	50%	1	100%
3	Aspek pengelolaan sumber daya manusia	-	-	16	69,56	-	-	-	-	-	-
4	Aspek pengelolaan sarana dan prasarana	4	18,18	2	8,70	1	8	-	-	-	-
	Total	22	100	23	100	12	100	4	100	1	100

Tabel II.2.a.4) Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu Bersifat Finansial/dapat Dinilai Uang Tahun 2021 (dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	2019	2020	2021
1	Kerugian negara/ daerah	3,929,218.00	131.050.880,00	245.483.709	11.600.345,39	-
2	Kewajiban setor kepada negara/daerah	-	-	-	-	-
	Total	3,929,218.00	131.050.880,00	245.483.709	11.600.345,39	-

**Tabel II.2.a.5) Kelompok Rekomendasi Temuan Audit Dengan Tujuan Tertentu
Tahun 2017 – 2021**

No	Kode	Deskripsi	Jumlah				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	01	Penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D dan masyarakat	2	16	8	-	-
2	02	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat	-	-	1	-	-
3	03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	1	-	-	-	-
4	04	Penghapusan barang milik negara/daerah	-	-	-	-	-
5	05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	3	5	4	-	-
6	06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi	-	19	9	5	-
7	07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	2	-	-	-	-
8	08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	1	2	1	-	-
9	09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	-	9	1	2	-
10	10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	-	-	-	-	-
11	11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	-	-	-	-	-
12	12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	-	-	-	-	-
13	13	Pelaksanaan sosialisasi	-	-	-	-	-
14	14	Lain-lain	-	-	-	2	-
Total			9	51	24	9	0

b. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Kasus

Tabel II.2.b.1) Jumlah ADTT Kasus

Tahun	Jumlah Audit
2017	15
2018	1
2019	2
2020	0
2021	0

Tabel II.2.b.2) Pokok Permasalahan Audit Dengan Tujuan Tertentu Kasus Tahun 2017 - 2021

No	ADTT Khusus/Kasus	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kepegawaian/ketenagakerjaan	14	1	2	-	-
2	Penyalahgunaan wewenang	-	-	-	-	-
3	Merugikan keuangan /kekayaan	-	-	-	-	-

No	ADTT Khusus/Kasus	2017	2018	2019	2020	2021
	daerah					
4	Korupsi/Pungutan liar	-	-	-	-	-
5	Pelayanan Masyarakat	1	-	-	-	-
6	Lain-lain	-	-	-	-	-
Total		15	1	2	0	0

Tabel II.2.b.3) Sumber Informasi ADTT Kasus Tahun 2017 -2021

No	Sumber Informasi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Permintaan/Laporan Kepala Instansi	5	0	0	0	0
2	Tindak Lanjut Penelitian dan Penelaahan Informasi/ Pengembangan Pemeriksaan Reguler/Hasil Inspeksi	2	1	2	0	0
3	Limpahan Pemeriksa Lain	8	0	0	0	0
4	Perintah langsung Walikota	0	0	0	0	0
Total		15	1	2	0	0

Tabel II.2.b.4) Pembuktian ADTT Kasus Tahun 2017 - 2021

No	Status Simpulan/Pembuktian	Tahun					Keterangan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Diyakini kebenarannya	13	1	2	0	0	Direkomendasikan hukuman disiplin
2	Diyakini sebagian	0	0	0	0	0	Dilakukan pembinaan
3	Tidak diyakini kebenarannya	2	0	0	0	0	Tidak dikenai sanksi
Total		15	1	2	0	0	

II. 3. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 48

Tahun 2017 tentang Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan revid laporan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II.3.1 Hasil Evaluasi atas SAKIP Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Tahun Reviu	Nilai Akuntabilitas Kinerja		Ket
	Predikat	Nilai	
2017	BB	71,95	Sangat baik
2018	BB	75,01	Sangat baik
2019	A	80,03	Memuaskan
2020	A	80,03	Memuaskan
2021	A	81	Memuaskan

*) Evaluasi oleh Inspektorat DIY an. Kemenpan

II.4 Reviu Laporan Keuangan

Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berkualitas. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas merupakan target pemerintah yang telah berkomitmen kuat untuk mendapatkan opini “*unqualified*” atau “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Tujuan Reviu Laporan Keuangan adalah:

1. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta/SKPD.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi laporan keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada pimpinan daerah maupun SKPD, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Reviu Laporan Keuangan dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu revid terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta tahun sebelumnya dan Laporan Keuangan semester I tahun berjalan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 12 (Dua Belas) tahun terakhir sejak LKPD tahun 2010-2021 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

Tabel II.4.1 Hasil Reviu Laporan Keuangan Tahun 2017 - 2021

Tahun Reviu	Hasil Reviu		Opini
	Akhir Tahun Sebelumnya	Semester I	
2017	1 LKPD th. 2016	1 LKPD sem 1 th 2016 5 LK SKPD sem 1 th. 2016	WTP
2018	1 LKPD th. 2017	1 LKPD sem 1 th 2017 5 LK SKPD sem 1 th. 2017	WTP
2019	1 LKPD th. 2018	1 LKPD sem 1 th 2018 5 LK SKPD sem 1 th. 2018	WTP
2020	1 LKPD th. 2019	1 LKPD sem 1 th 2019 5 LK SKPD sem 1 th. 2019	WTP
2021	1 LKPD th. 2020	1 LKPD sem 1 th 2020 5 LK SKPD sem 1 th. 2020	WTP
2022	1 LKPD th. 2021	1 LKPD sem 1 th 2021 5 LK SKPD sem 1 th. 2021	WTP

II.5 Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah

Reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sebagai *quality assurance*. Peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam proses perencanaan penganggaran adalah mendorong perangkat daerah agar meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan penganggaran untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas, sehingga prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan reviu dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerah adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa informasi dalam Rencana Kinerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Tugas Fungsi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD serta Musrenbang, Rencana Kerja, Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah sehingga dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan dalam APBD Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2021, reviu dilakukan terhadap dokumen RKPD Perubahan 2021, Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) tahun 2022, RKPD Tahun 2022 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2022.

Reviu RKPD dilakukan dengan penelaahan kesesuaian penyusunan dokumen RKPD yang bersifat tahunan dengan RPJMD dan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan bahwa dokumen RKPD telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan daerah.

Tabel II.5.1 Hasil Reviu RKA

Tahun Reviu	Hasil Reviu	
	RKPA tahun berjalan	RKA tahun depan
2017	51 RKPA SKPD Tahun 2017	51 RKA SKPD Tahun 2018
2018	51 RKPA SKPD Tahun 2018	51 RKA SKPD Tahun 2019
2019	51 RKPA OPD Tahun 2019	51 RKA OPD Tahun 2019
2020	51 RKPA OPD Tahun 2020	51 RKA OPD Tahun 2020
2021	51 RKPA OPD Tahun 2021	51 RKA OPD Tahun 2021

II.6 Reviu Penyerapan Anggaran

Reviu Penyerapan Anggaran dilaksanakan untuk mengetahui jumlah capaian serapan/anggaran, realisasi belanja serta mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan penyerapan anggaran per triwulan. Selama tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 Reviu Penyerapan Anggaran dilakukan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari atas realisasi triwulan IV tahun sebelumnya, bulan April atas realisasi Triwulan I tahun berjalan, bulan Juli atas realisasi Triwulan II tahun berjalan dan bulan Oktober atas realisasi Triwulan III tahun berjalan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II.6.1 Hasil Reviu Penyerapan Anggaran

Tahun Reviu	Realisasi Penyerapan Anggaran			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
2017	92,34%	11,19%	31,15%	41,66%
2018	88,18%	12,36%	33,93%	59,81%
2019	91,19 %	12,01 %	32,35 %	52,81 %
2020	89,71 %	12,31 %	36,43 %	55,44 %
2021	82,60 %	8,23 %	22,30 %	51,40 %

Mulai tahun 2018 Triwulan I sudah mulai menggunakan skoring atas 4 variabel yaitu :

1. Alokasi dan realisasi Belanja
2. Ketepatan waktu
3. Transparansi dan Akuntabilitas
4. Efisiensi dan efektivitas

Tabel II. 6. 1 Hasil Skoring Reviu Penyerapan Anggaran

Tahun Reviu	Skoring			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
2018	0	60,83 (Cukup)	66,70 (Cukup Baik)	80,91 (Baik)
2019	83,12 (Baik)	82,81 (Baik)	81,80 (Baik)	76,06 (Baik)
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Keterangan : pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat skoring, reviu penyerapan anggaran dilaksanakan secara manual. Skoring hanya ditemukan jika menggunakan sistem.

II.7 Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

Reviu Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dilakukan untuk mengukur keterlaksanaan kegiatan PBJ pada unit kerja teknis di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terutama yang dilakukan melalui lelang/tender apakah telah sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Tujuan reviu PBJ adalah:

- a) Mengetahui jumlah anggaran dan realisasi belanja barang jasa dan belanja modal setiap tribulan.
- b) Mengetahui jumlah atau posisi belanja barang jasa dan belanja modal yang telah dilakukan pelelangan, ditetapkan pemenang lelang, ditandatangani kontrak dan tingkat penyelesaian paket pekerjaan pada setiap akhir tribulan.
- c) Mengidentifikasi hambatan dan memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan pelaksanaan PBJ.

Selama tahun 2021, Reviu PBJ dilakukan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari atas realisasi triwulan IV tahun 2020, bulan April atas realisasi Triwulan I tahun 2021, bulan Juli atas realisasi Triwulan II tahun 2021 dan bulan Oktober atas realisasi Triwulan III tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel II.7.1 Hasil Reviu Pengadaan Barang dan Jasa

Tahun	Realisasi PBJ Sudah Dilelang			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
2017	88,16%	26,57%	54,94%	88,54%
2018	92,36%	16,36%	56,25%	87,10%
2019	98,59 %	18,24 %	42,21 %	89,02 %
2020	93,92 %	18,92 %	22,50 %	33,13 %
2021	34,55 %	35,52	39,65%	92,06

II.8 Reviu Capaian Kinerja

Reviu Capaian Kinerja dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode pelaksanaan reviu dengan membandingkan hasil monitoring dan evaluasi Kinerja terhadap dokumen perencanaan, RPJMD, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama terhadap data pendukungnya.

Selama tahun 2021 reviu laporan pengukuran kinerja dilakukan 4 (empat) kali yaitu pada bulan Januari atas realisasi triwulan IV Tahun 2020, bulan April atas realisasi triwulan I, bulan Agustus atas realisasi triwulan II dan bulan Oktober atas realisasi triwulan III. Pelaksanaan Pengukuran Kinerja dilakukan pada Desk Timbal Balik yang dilaksanakan oleh Bappeda bersama tim

II.9 Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi Implementasi SAKIP dilakukan untuk:

1. Mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan sistem AKIP meliputi:
 - a. Memperoleh gambaran menyeluruh tentang implementasi sistem AKIP
 - b. Mengidentifikasi kendala/hambatan dan kelemahan sistem AKIP
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan implementasi sistem AKIP
2. Menilai kinerja SKPD, khususnya:
 - a. Menginformasikan kinerja SKPD
 - b. Memberikan rekomendasi konstruktif guna peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD

Pada Tahun 2016 terdapat perubahan pedoman evaluasi SAKIP dari Permenpan Nomor 20 Tahun 2013 diubah menjadi Permenpan Nomor 2012 Tahun 2015 dan dipedomani dengan Perwal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2017 – 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel II.9.1 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah instansi yang dievaluasi	48	44	44	44	42
Hasil Evaluasi					
Sangat Memuaskan (AA)	0	0	0	0	1
Memuaskan (A)	0	14	41	37	39
Sangat Baik (BB)	9	25	3	7	2
Baik (B)	35	5	0	0	0
Cukup (CC)	4	0	0	0	0
Kurang (C)	0	0	0	0	0
Sangat Kurang (D)	0	0	0	0	0

II.10 Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa

Pengawasan PBJ selain dilakukan melalui kegiatan audit, reviu dan evaluasi, juga melalui monitoring. Kegiatan Monitoring PBJ dilakukan pada paket pengadaan barang jasa tertentu yang tidak tersampling dalam kegiatan audit operasional, audit dengan tujuan tertentu maupun evaluasi PBJ. Monitoring PBJ dilakukan pada triwulan IV tahun anggaran untuk mengukur capaian keterlaksanaan suatu paket pengadaan barang jasa yang disinyalir ada permasalahan, untuk mengukur tingkat keterselesaiannya sebelum tahun anggaran berakhir.

Tabel II.10.1 Target dan Realisasi Monitoring PBJ Tahun 2017 - 2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	5 laporan	5 laporan
2018	4 laporan	4 laporan
2019	4 laporan	5 laporan
2020	-	-
2021	-	-

II.11 Monitoring Kepatuhan Jam Kerja

Monitoring kepatuhan jam kerja dilakukan dalam rangka mengukur tingkat kedisiplinan PNS dalam pelaksanaan suatu aturan dan kebijakan. Pelaksanaan Monitoring kepatuhan jam kerja bersifat rutin yang berdekatan dengan perayaan hari besar keagamaan atau bersifat insidental

berdasarkan indikasi tertentu dan bersifat insidental atas instruksi Walikota atau laporan yang masuk.

Tabel II.11.1 Jumlah dan Hasil Pelaksanaan Monitoring kepatuhan jam kerja Tahun 2017 -2021

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021*)
Jumlah Monitoring	4	4	2	1	0
Hasil Monitoring : Prosentase ketidakhadiran tanpa keterangan	0,03 %	0,3 %	0,19	0,03 %	0 %

*)Pada tahun 2021 dalam masa pandemi tidak dilaksanakan monitoring

II.12 Penelitian dan Penelaahan Informasi

Penelitian dan penelaahan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menindaklanjuti aduan, informasi dan atau laporan yang diterima Inspektorat sehingga akan diketahui apakah dari informasi tersebut benar terjadi penyimpangan dan pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab. Hasil penelitian dan penelaahan informasi menyimpulkan perlu tidaknya langkah pengawasan selanjutnya atas informasi tersebut, yang berupa pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tabel II.12.1 Sumber Informasi Tahun 2017 - 2021

No.	Sumber Informasi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Permintaan/Laporan Instansi	1	2	0	0	0
2.	Aduan dari masyarakat/ UPIK/JSS	16	9	9	7	11
3.	Pengembangan pemeriksaan reguler/ Hasil Inspeksi	0	0	0	0	0
4.	Perintah langsung Walikota/Disposisi	1	0	0	0	1
5.	Mass Media	1	0	1	0	0
	Jumlah	19	11	10	7	12

Tabel II.12.2 Jenis Informasi Tahun 2017 -2021

No.	Jenis Informasi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah informasi masuk	19	11	10	7	12
2.	Jumlah informasi dalam proses	9	4	3	2	11
3.	Jumlah informasi yang selesai diteliti dan ditelaah Berkadar pengawasan	3	1	3	2	1
4.	Jumlah informasi yang selesai diteliti dan ditelaah tidak berkadar pengawasan	7	6	4	3	0

II. 13 Pengawasan Lainnya

a. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan :

1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Th 2012-2025
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Dalam kegiatan Monev PPK terdapat 3 sub kegiatan yaitu monev pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) , pendampingan dan penilaian OPD percontohan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta pengendalian gratifikasi.

Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tanggal 20 Juli 2018

No	Area Intervensi	Tahun 2021		
		Target %	Bobot	Realisasi %
1.	Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	15	100
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	100	15	89,82
3.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100	15	91,97
4.	Kapabilitas APIP	100	15	78,07
5.	Manajemen ASN	100	15	93,56
6.	Optimalisasi Pendapatan Daerah	100	15	77,94
7.	Manajemen Aset Daerah	100	10	80,35
	Nilai Akumulatif		100	87,95

1) Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

Untuk pendampingan dan penilaian ZI WBK-WBBM Tahun 2021 dilaksanakan pada 3 OPD percontohan. Pendampingan dan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021, kemudian atas hasil penilaian TPI 2 OPD diantaranya disampaikan ke kementerian PAN dan RB untuk divalidasi WBK dan 1 OPD untuk divalidasi WBBM.

Tabel II.13.a.2) Penilaian Zona Integritas 2017-2021

No.	SKPD Percontohan	Hasil Penilaian Internal					Validasi Kemenpan dan RB				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dinas Perizinan	88,97	93,13	87,24	-		-	93,13	-	-	
2	UPT Pusat Bisnis	89,79	-	76,12	-		-	-	-	-	
3	Dinas Kesehatan	77,88	92,30	88,42	-		-	92,30	-	-	
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	55,36	-	84,62	80,97	90,54	-	-	-	80,97	-
5	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	83,24	80,61	87,24	87,23		-	80,61	77,58	-	
6	Kelurahan Prawirodirjan	62,39	-	87,24	-		-	-	-	-	
7	Puskesmas Mantrijeron	72,49	-	87,24	-		-	-	77,45	-	
8	Kemantren Wirobrajan	-	-	-	-	78,01	-	-	-	-	-
9	Kemantren Gondokusuman	-	-	-	-	76,90	-	-	-	-	-

*) Tahun 2017, tidak melakukan penilaian ke Kementerian PAN dan RB

2) Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Kota Yogyakarta telah dirintis sejak Tahun 2013 dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sosialisasi pengendalian gratifikasi juga telah dilakukan sejak Tahun 2014 hingga saat ini bersamaan dengan sosialisasi anti korupsi di berbagai kesempatan yang ada, Tahun 2016 sosialisasi dilaksanakan untuk stake holder eksternal antara lain Komite Sekolah dari tingkat TK sampai SMA/SMK, LPMK dan PKK Kecamatan. Tahun 2017 melaksanakan sosialisasi Anti Korupsi yang didalamnya ada Pengendalian Gratifikasi berdasarkan permintaan dari Perangkat Daerah. Pada Tahun 2018 dilakukan sosialisasi Revisi Perwal Gratifikasi Nomor 113 Tahun 2017 pada saat Gelar Pengawasan Daerah. Pada Tahun 2020 dilakukan pemberitahuan terkait gratifikasi terhadap keseluruhan OPD melalui surat edaran Walikota pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Stop jasa Avalis

Tabel II.13.a.3) Jumlah Laporan Gratifikasi Tahun 2017 -2021

Tahun	SKPD /BUMD Wajib Lapor	Peristiwa Gratifikasi bentuk uang		Peristiwa Gratifikasi bentuk barang	
		Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah	Perkiraan Nilai (Rp)
2017	51	1	2.000.000	3	2.910.000
2018	51	0	0	0	300.000
2019	51	0	0	8	800.000
2020	51	0	0	0	0
2021	54	0	0	0	0

b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Pelaksanaan PMPRB didasarkan pada Peraturan menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Berikut adalah hasil PMPRB Pemerintah Kota Yogyakarta :

Tabel II.13.b Hasil PMPRB On Line Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
A.	Proses	54,41	58,46	59,17	89,9	95,95
I.	Manajemen Perubahan	5	5	5	96	100
II.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2,71	5	5	75	75
III.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	6	6	79	100
IV.	Penataan Tatalaksana	4,88	4,88	4,86	96,5	98
V.	Penataan Sistem Manajemen SDM (15)	14,14	14,49	15	97,67	99
VI.	Penguatan Akuntabilitas	5,74	5,74	6	100	100
VII.	Penguatan Pengawasan	10,28	11,42	11,31	88,8	92,4
VIII.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,67	5,93	6	86	98,4
B.	HASIL	29,58	29,84	30,89	0	82,11
I.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi/Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	14,04	14,27	14,7	0	87,02
II.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	7,59	7,59	8,09	0	94,5
III.	Kualitas Pelayanan Publik	7,95	7,98	8,1	0	90,75
IV.	Kinerja Organisasi	-	-	-	-	86,15
	Indeks RB (Total)	83,99	88,3	90,06	89,9	95,5

c. Pengendalian Intern Pemerintah

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah membangun SPIP dengan mengacu Surat Edaran Mendagri No. 120/2356/SJ tentang Penyelenggaraan SPIP dan sudah terbit Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP, Pembentukan Satgas tingkat Pemerintah Kota yang dikoordinir Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Yogyakarta berkoordinasi, bekerjasama dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina SPIP. Alokasi anggaran SPIP berada di Inspektorat Kota Yogyakarta untuk berbagai kegiatan yaitu :

Peraturan-peraturan terkait SPIP mulai tahun 2010 sampai dengan 2021 yaitu:

Tabel II.13.c.1) Tahap Penyusunan Peraturan SPIP

No.	Tahun	Peraturan	Isi
1	2010	Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2010	Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta
2	2010	Keputusan Walikota Nomor 554/KEP/Tahun 2010	Pembentukan Tim Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta
3	2011	Keputusan Walikota Nomor 482 Tahun 2011	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP
4	2011	Surat Edaran Sekda Nomor 130/35/SE/2011 tanggal 6 Juni 2011	Penyelenggaraan SPIP
5	2021	Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tanggal 7 April 2021	Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Penyelenggaraan Diklat SPIP telah dilaksanakan mulai tahun 2010 sampai dengan 2021 dengan jumlah personil 245 orang.

Tabel II.13.c.2) Jumlah Personil mengikuti Diklat/Workshop SPIP

Angkatan	Tahun	Jumlah
I – III	2010	40 orang
IV – V	2011	10 orang
VI	2012	5 orang
VII	2013	2 orang
VIII	2014	47 orang
-	2015	-
-	2016	-
-	2017	-
-	2018	-
-	2019	-
-	2020	-
-	2021	114 orang
Jumlah		245 orang

Pada tahap pemahaman, Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan Sosialisasi ke seluruh SKPD/Unit Kerja

Tabel II.13.c.3) Tahap Pemahaman SPIP

No.	Peserta sosialisasi	Jumlah	Waktu Pelaksanaan
1	Auditor Inspektorat dan seluruh Kepala SKPD/unit kerja	79 orang	Tahun 2009
2	Seluruh Kepala SKPD/unit kerja	49 orang	Tahun 2011
3	45 SKPD dan 18 Puskesmas di Pemerintah Kota Yogyakarta	2.500 orang	Tahun 2012
4	36 SKPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	114 orang	Tahun 2021

Sebagai upaya peningkatan pengetahuan tentang SPIP telah diselenggarakan workshop bagi satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan SKPD.

Tabel II.13.c.4) Penyelenggaraan Workshop SPIP

No.	Kegiatan	Peserta Workshop	Jumlah	Waktu Pelaksanaan
1	Workshop Pemetaan	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta	25 orang	Tahun 2011
2	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop <i>Diagnostic Assesment</i> dan Penilaian Risiko • Workshop Pemetaan untuk Satgas SPIP SKPD 	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan Satgas SPIP SKPD	73 orang	Tahun 2012
3	Workshop Pemetaan SPIP berbasis penilaian resiko	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan 6 (enam) SKPD sampel	35 orang	Tahun 2013
4	Workshop Evaluasi Terpisah	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan PFA Inspektorat Kota Yogyakarta	40 orang	Tahun 2014
5	Workshop Penyusunan RTP	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta dan PFA Inspektorat Kota Yogyakarta	40 orang	Tahun 2015
6	Lokakarya Nasional Maturitas SPIP	APIP se DIY Jateng dan Satgas SPIP Pemerintah	150 orang	Tahun 2015

No.	Kegiatan	Peserta Workshop	Jumlah	Waktu Pelaksanaan
		Kota Yogyakarta/SKPD		
7	Overview SPIP dan Pengenalan Form Penilaian Risiko	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta/SKPD	100 orang	Tahun 2018
8	Workshop Penyusunan RTP	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta/OPD	100 orang	Tahun 2019
9	Workshop Maturitas SPIP	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta/OPD	180 orang	Tahun 2019
10	Workshop SPIP dan RTP	Pada Tahun 2020 Kegiatan tidak dilaksanakan pada masa andemic Covid 19		
11	Workshop SPIP Terintegrasi	Satgas SPIP Pemerintah Kota Yogyakarta/OPD	114 orang	Tahun 2021

Monitoring penerapan SPIP telah dilakukan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun yaitu:

Tabel II.13.c.5) Monitoring SPIP

No.	Tahun	SKPD	Periode
1	2012	25	Juli, Agustus, September dan Desember
2	2013	40	Juli, Oktober, Nopember dan Desember
3	2014	49	Oktober, November dan Desember
4	2015	53	Juni, Agustus, Oktober dan Desember
5	2016	51	Juli, September, Oktober dan Nopember
6	2017	54	April, Juli, September dan Desember
7	2018	54	April, Juli, September dan Desember
8	2019	51	Reviu RTP periode Juli dan Workshop Maturitas SPIP periode November
9	2020	51	Monev SPIP dan November
10	2021	51	Over view PM SPIP

Pada Tahun 2021 dilakukan Review Rencana Tindak Pengendalian di masing-masing bidang dengan obyek SKPD sesuai mitra.

d. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Kegiatan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan kegiatan menginventarisir data-data temuan beserta tindak lanjutnya baik internal maupun eksternal dengan dilakukan monitoring maupun koordinasi dengan mitra kerja dimana Inspektorat sebagai koordinator tindak lanjut pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Upaya mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan juga dilakukan dengan menyelenggarakan koordinasi intensif Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan seluruh SKPD/unit kerja.

e. Klinik Konsultasi

Dalam rangka mengimplementasikan peran APIP yang efektif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kota Yogyakarta telah membuka klinik konsultasi sejak pertengahan tahun 2015 dan disosialisasikan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Melalui klinik konsultasi, Inspektorat berupaya untuk meningkatkan upaya pencegahan terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan. Klinik konsultasi ini sekaligus sebagai inovasi karena diharapkan SKPD yang semula sebagai obyek pengawasan menjadi proaktif sebagai subyek pengawasan dengan melakukan konsultasi kepada Inspektorat Kota Yogyakarta tanpa harus menunggu jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Tabel II.13.f Jumlah Pemakai Layanan Klinik Konsultasi Pengawasan Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Pemakai
1.	2017	28 (dua puluh delapan)
2.	2018	26 (dua puluh enam)
3.	2019	25 (dua puluh lima)
4.	2020	22 (dua puluh dua)
5	2021	15 (lima belas)

f. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Yogyakarta

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Di Kota Yogyakarta dibentuk dengan Keputusan Walikota Nomor 511 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 dan kemudian dikukuhkan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2016. Satuan Tugas Saber Pungli melibatkan Pemerintah Kota Yogyakarta, Polres Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta, Kodim 0734, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri. Satgas Saber Pungli diketuai oleh Wakil Kepala Polres Kota Yogyakarta dan anggota satgas tersebar di empat kelompok kerja (Pokja Unit Intelijen, Pokja Unit Pencegahan, Pokja Unit Penindakan, dan Pokja Unit Yustisi). Selama tahun 2021, Satgas Saber Pungli Kota Yogyakarta telah melaksanakan Sosialisasi Saber Pungli sebanyak 722 kali, melaksanakan koordinasi sebanyak 12 kali dan 12 laporan yang dikirmkan ke Kementrian Dalam Negeri.

BAB III TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Tindak lanjut hasil audit merupakan kewajiban Perangkat Daerah yang diperiksa. Tindak lanjut tersebut divalidasi oleh Auditor untuk dinyatakan suatu temuan sudah selesai ditindaklanjuti.

Inspektorat Kota Yogyakarta selain menginventarisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta sendiri juga menginventarisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya dan pemeriksaan BPK-RI sebagai bahan pemutakhiran data yang diadakan pemeriksa bersangkutan.

III.1 Tindak Lanjut Audit Operasional

Tindak lanjut hasil Audit Operasional dilaksanakan oleh SKPD yang diperiksa. Pemantauan tindak lanjut dilakukan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut Inspektorat.

Tabel III.1.1 Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional Tahun 2017 -2021

Tahun	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Dlm Proses	Belum
2017	103	101	2	0
2018	34	33	1	0
2019	47	44	3	0
2020	16	14	2	0
2021	5	5	0	0

*) Pemeriksaan Reguler

III.1.2 Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu

Tahun	Kerugian Negara/Daerah (01) Rp		Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah (02) Rp	
	Temuan	Tindak Lanjut	Temuan	Tindak Lanjut
2017	105.987.507,41	105.987.507,41	-	-
2018	29.652.772,00	29.652.772,00	-	-
2019	34.386.900,63	34.386.900,63	-	-
2020	3.180.834	3.180.834	-	-
2021	105.000	105.000	-	-

a. ADTT Tematik

Tindak lanjut Audit Dengan Tujuan Tertentu berupa pengembalian kerugian daerah atau kekurangan kewajiban setor ke Kas Daerah dan tindak lanjut administratif.

Tabel III.2.a.1) Tindak lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Tematik Tahun 2017-2021

Tahun	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Dalam Proses	Belum
2017	9	9	0	0
2018	46	46	0	0
2019	24	23	1	0
2020	22	20	2	0
2021	2	2	0	0

Tabel III.2.a.2) Tindak Lanjut Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Tematik Tahun 2017 -2021

Tahun	Kerugian Negara/ Daerah (01) Rp		Kewajiban Setor kepada Negara/Daerah (02) Rp	
	Temuan	Tindak Lanjut	Temuan	Tindak Lanjut
2017	3,929,218.00	3,929,218.00	-	-
2018	131.050.880,00	131.050.880,00	-	-
2019	245.483.700,00	245.483.700,00	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

b. ADTT Kasus

Tindak lanjut Audit Dengan Tujuan Tertentu Kasus dari Inspektorat antara lain penjatuhan hukuman disiplin pada pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran dan berupa pengembalian kerugian daerah atau kekurangan kewajiban setor ke Kas Daerah.

Tabel III.2.b.1) Tindak Lanjut Hasil ADTT Kasus Tahun 2017 -2021

Tahun	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Dalam Proses	Belum
2017*)	13	0	13	0
2018	1	0	1	0
2019	0	0	0	0

Tahun	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Dalam Proses	Belum
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0

*) Pemeriksaan Khusus

**Tabel III.2.b.2) Tindak Lanjut Berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin
Tahun 2017 - 2021**

No	Hukuman disiplin	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Hukuman Ringan	0	0	0	0	0
1	Tegoran lisan	0	0	0	0	0
2	Tegoran tertulis	0	0	0	0	0
3	Pernyataan tidak puas secara tertulis	0	0	0	0	0
B	Hukuman Sedang	0	0	0	0	0
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0
2	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0
3	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0
C	Hukuman Berat	0	0	0	0	0
1	Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah paling lama 3 (tiga) tahun	0	0	0	0	0
2	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	0	0	0	0	0
3	Pembebasan jabatan	0	0	0	0	0
4	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	0	0	0	0	0
5	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0

